

## **POLA INTERVENSI STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN PESISIR TRIMULYO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

**Reny Yesiana<sup>1)</sup>; Muhammad Hedy Zuliana<sup>1)</sup>;  
Saly Diah Ayu Kirana<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Departemen Sipil dan Perencanaan, Sekolah Vokasi  
Universitas Diponegoro, Semarang

renyyesiana@gmail.com; hedyofficial@gmail.com; salydiahak@gmail.com;

### **Abstract**

*The kinds of aid and intervention who already implemented as an effort to protect coastal areas in Semarang City. Not only from government, but from the private and academics also have helped on coastal areas management. These aid not only embodied physically likes the giving of mangrove seedlings, build up the breakwater, but also the soft skills development likes training to manage fishery and marine to make something useful. These intervention was held for two objectives, the first is to protect coastal areas and the last is to empower the communities on there. These intervention be expected to make a change the quality of life in coastal areas better. The aim of this research is to assesst the scheme of stakeholder's intervention on coastal areas in Trimulyo, Semarang City. Sampling technique that used in this research snowballing sampling, because the stakeholder information who involved will be asked before to the communities on there. After that, the interview will be continue to the government, private, academics and the scheme each stakeholder will be seen. Based of the result, coastal areas management who already implemented by the government, it was created 4 schemes, they are: the government non collaboration or independently give the intervention and the aid directly to communities, every government agencies do the collaboration with the other government agencies, multistakeholder collaboration, they are NGO, Government, academics and Privat sectors through CSR programs. Each scheme has the weaknesses and strengths, the collaboration basically emphasized, because a lot of people can give the input and controlling the intervension implementation. The intervension who implemented has the positive impact for environment and society, they are: the decrease of environtmental degradation, reduction the threat of cataclysm, climate change on coastal areas related the rehabilitation, rejuvenation environmental ecosystem. In other side, there are too many activities about training to the society makes them more resilience on their economy activties.*

**Keyword: schemes, intervention, coastal area**

### **Abstrak**

*Berbagai bantuan telah dikururkan sebagai upaya perlindungan terhadap kawasan pesisir Trimulyo di Kota Semarang. Tidak hanya pemerintah, namun juga swasta dan akademisi membantu dalam pengelolaan kawasan pesisir tersebut. Bantuan ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk fisik seperti pemberian bibit mangrove, pembangunan alat pemecah ombak, namun juga berupa pengembangan softskill berupa pelatihan pembuatan krupuk dari hasil perikanan. Intervensi ini dilakukan dengan dua tujuan, yaitu perlindungan terhadap kawasan pesisir dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya intervensi ini, diharapkan ada perubahan terhadap kondisi kawasan pesisir menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini*

adalah untuk mengkaji pola intervensi stakeholder terhadap pengelolaan kawasan pesisir Trimulyo, Kota Semarang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowballing sampling, karena informasi stakeholder yang terlibat akan ditanyakan terlebih dahulu kepada kelompok masyarakat. Setelah itu wawancara akan dilakukan kepada stakeholder pemerintah, swasta, akademisi dan akan terlihat pola hubungan antarstakeholder tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengelolaan kawasan pesisir yang dilakukan oleh stakeholder terdapat 4 pola hubungan yang terbentuk, yaitu pemerintah non kolaborasi, pemerintah berkolaborasi dengan sesama pemerintah (antar dinas), serta kolaborasi multistakeholder yaitu NGO, pemerintah dan akademisi serta swasta melalui program CSR. Masing-masing pola memiliki kelebihan dan kekurangan. Kolaborasi pada dasarnya lebih ditekankan, karena banyak pihak yang bisa memberikan masukan dan mengontrol pelaksanaan intervensi tersebut. Intervensi yang ada berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, yaitu penurunan degradasi lingkungan, penurunan ancaman bencana alam dan perubahan iklim di wilayah pesisir terkait rehabilitasi dan peremajaan kembali ekosistem lingkungan. Disamping itu, adanya berbagai pelatihan yang diberikan, menimbulkan rasa kemandirian dan resilience dalam aktivitas perekonomian masyarakat sekitar.

**Kata kunci: pola, intervensi, wilayah pesisir**

### **Pendahuluan**

Kenaikan muka air laut merupakan salah satu dampak dari pemanasan global. Susandi et al (2008) menyebutkan dengan adanya kenaikan muka air laut menyebabkan tergenangnya air di wilayah daratan dekat pantai. Dampak lain yang diakibatkan oleh naiknya muka laut adalah erosi pantai, berkurangnya salinitas air laut, menurunnya kualitas air permukaan, dan meningkatnya resiko banjir juga mengakibatkan terjadinya abrasi.

Kenaikan muka air laut selain mengakibatkan perubahan arus laut pada wilayah pesisir juga mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove (Suhelmi dan Prihatno, 2014). Apabila keberadaan mangrove tidak dapat dipertahankan lagi, maka abrasi pantai akan kerap terjadi karena tidak adanya penahan gelombang. Pencemaran dari sungai ke laut akan meningkat karena tidak adanya filter polutan, dan zona budidaya *aquaculture* pun akan terancam dengan sendirinya (Kimpraswil 2002 dalam Kusmana, 2010).

Kondisi bergesernya garis pantai ke arah daratan juga terjadi di Kota

Semarang. Penelitian yang telah dilakukan oleh Wibawa (2012) menghasilkan informasi bahwa perubahan garis pantai terlihat dalam waktu 12 tahun telah terjadi pergeseran garis pantai sebesar 49,54 meter. Jika hal ini terus meningkat pada tahun-tahun mendatang tentu saja, hal ekstrim yang terjadi adalah hilangnya Kota Semarang.

Data yang diolah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang tahun 2008 dalam Fauziah (2014) menunjukkan bahwa kenaikan muka air laut telah menyebabkan kerugian ekonomi akibat kerusakan mangrove sebesar 729 juta per tahun, sebanyak 2.889 ha areal tambak rusak dan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 110 juta. Selain itu juga, kenaikan muka air laut juga mengakibatkan erosi yang berdampak sebanyak 10.425 rumah rusak dan kerugian yang timbul akibat kerusakan infrastruktur pantai sebesar 5,6 milyar rupiah.

Berbagai bantuan telah dikururkan sebagai upaya perlindungan terhadap kawasan pesisir di Kota Semarang. Tidak hanya pemerintah,

namun juga swasta dan akademisi membantu dalam pengelolaan kawasan pesisir tersebut. Bantuan ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk fisik seperti pemberian bibit mangrove, pembangunan alat pemecah ombak, namun juga berupa pengembangan *softskill* seperti pelatihan pembuatan kerupuk dari hasil perikanan dan lain-lain. Intervensi ini dilakukan dengan dua tujuan, yaitu perlindungan terhadap kawasan pesisir dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya intervensi ini, diharapkan ada perubahan terhadap kondisi kawasan pesisir menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pola intervensi *stakeholder* terhadap pengelolaan kawasan pesisir di Kota Semarang.

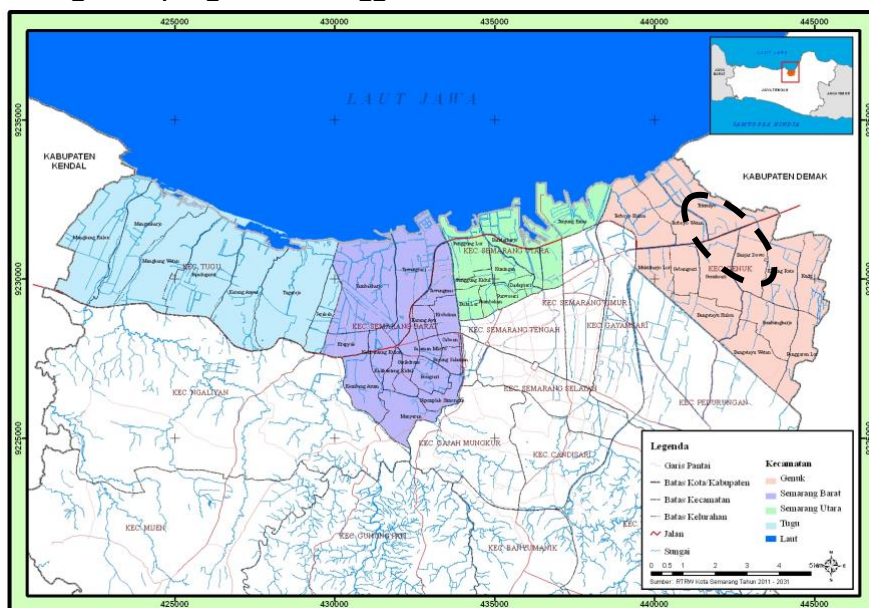
**Perumusan Masalah**

Intervensi merupakan bentuk pelibatan individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Intervensi ini dilakukan dalam rangka pengelolaan kawasan pesisir yang tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga swasta dan akademisi. Pemerintah berfungsi sebagai kontrol kebijakan terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir. Sedangkan perguruan tinggi

berkontribusi dalam hal menyusun kajian-kajian yang hasilnya dapat dijadikan rujukan atau diaplikasikan dalam pengelolaan tersebut, misalnya dalam hal diversifikasi jenis ikan atau jenis alat pemecah ombak yang sesuai dengan kawasan pesisir yang bersangkutan. Sedangkan swasta biasanya memberikan bantuan dalam bentuk CSR. Masing-masing *stakeholder* berupaya untuk memberikan kontribusi dalam pengelolaan tersebut, namun dalam realisasinya ada yang saling berkolaborasi dan berjalan secara mandiri. Jika banyak *stakeholder* yang berjalan sendiri-sendiri, hal ini menjadikan intervensi tersebut kurang optimal dan seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, agar pengelolaan menjadi optimal, maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai “bagaimana intervensi *stakeholder* dalam pengelolaan pesisir Trimulyo, Kecamatan Genuk Kota Semarang?”

**Wilayah Studi dan Teknik Sampling**

Lingkup kajian dari penelitian ini adalah Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk Kota Semarang.



Sumber: RTRW Kota Semarang, 2011

**Gambar I**  
**Peta Wilayah Studi Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Semarang**

mempunyai hak dan kepentingan dalam sistem, berupa perorangan, komunitas, kelompok sosial, atau organisasi yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh sistem.

*Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir pada hakikatnya bersifat *multistakeholder*, artinya, tidak hanya satu dinas atau organisasi, namun juga beberapa bentuk kerjasama antar-*stakeholder* baik dari latar belakang pemerintahan maupun swasta ataupun NGO (*Non Government Organization*).

Sumber: Penyusun, 2016

**Gambar 2  
Identifikasi Stakeholder**

**Hasil dan Pembahasan**

Menurut Hobley (1996) dalam Tadjudin (2000) mendefinisikan *stakeholder* sebagai orang atau organisasai yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program pembangunan serta orang atau organisasi yang terkena dampak dari kegiatan yang bersangkutan, sedangkan menurut Suporahardjo (2005) adalah orang-orang yang

**Identifikasi Keterlibatan  
Stakeholder dalam Pengelolaan  
Wilayah Pesisir**

Dinas/ instansi pemerintahan dan non pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir terdiri dari multidisplin bidang. Berikut penjelasan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Pesisir Trimulyo Genuk:

**Tabel 1  
Stakeholder yang Terlibat dalam Pengelolaan Pesisir Trimulyo Kota Semarang**

<b>Pemerintah</b>	<b>Akademisi</b>	<b>Swasta / NgO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang</li> <li>• Dinas Pertanian Kota Semarang</li> <li>• Dinas Pariwisata Kota Semarang</li> <li>• Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) UNDIP</li> <li>• Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang</li> <li>• Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (DPWK) UNDIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercy Corps Indonesia</li> <li>• Bintari</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis, 2016

**I. Pemerintah**

Jentoft (1989 dalam Fauzi, 2005) menjelaskan bahwa pemerintah harus terlibat atau campur tangan dalam

pengelolaan tersebut karena tiga alasan berikut ini :

- Pemerintah ikut mengelola karena alasan efisiensi. Hal ini berarti

keikutsertaan pemerintah dalam mengelola sumberdaya supaya efisien dapat ditingkatkan. Keterlibatan pemerintah adalah dalam hal pengendali kegiatan sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas yang berakhir pada inefisiensi.

- Pemerintah terlibat dalam pengelolaan sumberdaya supaya keadilan dapat diwujudkan. Jika pemerintah tidak ikut campur tangan, nelayan yang kuat dan besar akan mengambil manfaat secara berlebihan dan membiarkan nelayan kecil dalam kemiskinan dan kemelaratan. Jika tidak ada upaya dan aksi pemerintah yang dilakukan secara afirmatif dalam membantu nelayan kecil, kondisi ketimpangan akan terus berlanjut.
- Keterlibatan pemerintah diperlukan dalam hal mengelola sumberdaya karena alasan administrasi. Di sisi lain, asumsi dan fakta menyatakan bahwa hanya pemerintah yang berhak menjalankan administrasi dengan otoritas dan kemampuannya.

Dengan alasan tersebut pula, pemerintah ikut serta dalam pengelolaan kawasan pesisir. Berikut detail instansi pemerintah yang terkait dalam pengelolaan kawasan pesisir:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Semarang

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai garda terdepan tentunya memiliki peranan yang cukup penting terkait pengelolaan kawasan pesisir. Berbagai intervensi tentunya sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan baik secara fisik maupun non fisik. Untuk tingkat daerah, pelaksananya adalah DKP Kota Semarang dan berkoordinasi dengan DKP Provinsi Jawa Tengah.

- b. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Dinas Koperasi dan UMKM bergerak pada bidang pemberdayaan dan

pengelolaan ekonomi masyarakat secara mandiri melalui basis wirausaha dan koperasi. Terkait pengelolaan wilayah pesisir, tentunya terdapat peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam aspek perekonomian dan usaha masyarakat sekitar di wilayah pesisir.

- c. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian tidak hanya bergerak dalam bidang pertanian tanaman pangan, namun juga bidang perkebunan dan kehutanan. Pada bidang ini, khususnya seksi pelestarian dan konservasi ikut terlibat dalam penanaman mangrove di Kota Semarang.

- d. Dinas Pariwisata

Kaitannya terhadap wilayah pesisir, tentunya Dinas Pariwisata memiliki keterlibatan dan peran di dalamnya berkenaan wilayah pesisir sebagai salah satu objek wisata. Bagaimana sistem pengelolaan wilayah pesisir dalam perspektif potensi pariwisata yang berkaitan dengan ekonomi dan interaksi masyarakat sekitar.

- e. Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup sebagai badan pemerintah yang berorientasi pada *environment upgrading* atau peningkatan kualitas lingkungan memiliki peran dan tanggung jawab terhadap wilayah pesisir. Hal tersebut berkenaan dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah pesisir Kota Semarang yang mengalami penurunan kualitas lingkungan dan pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah lingkungan dan lebih ekstrim lagi adalah permasalahan mengenai kebencanaan.

## 2. Akademisi

- a. FPIK Undip

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro merupakan salah satu akademisi yang berfokus pada pengelolaan kawasan pesisir. Melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, FPIK memfokuskan diri pada ekologi pesisir, mangrove, dan infrastruktur pantai seperti alat dan bangunan pemecah ombak.

b. LP2M Unnes

LP2M Universitas Negeri Semarang merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Semarang kepada masyarakat. Fokus dan Peran LP2M Unnes dalam pengelolaan kawasan pesisir adalah pada aspek sosial dan *livelihood* masyarakat pesisir.

c. DPWK Undip

Sebagai salah satu departemen yang berfokus dalam bidang perencanaan kota dan wilayah tentunya memiliki peran terkait kawasan pesisir. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota berfungsi sebagai tim *monitoring* dan evaluasi serta perencana kawasan pesisir.

**3. Swasta / NGO**

a. Mercy Corps Indonesia

Mercy Corps Indonesia merupakan organisasi atau pihak ketiga yang bergerak pada bidang lingkungan. Dalam prakteknya, Mercy Corps Indonesia tidak berjalan secara sendiri, namun melalui *partnership* dengan berbagai

instansi lainnya (baik berasal dari pemerintah maupun non pemerintah) guna menjalankan program-programnya.

b. Bintari

Bintari merupakan salah satu NGO lokal yang berkecimpung dalam pengelolaan kawasan pesisir. Bintari lebih fokus pada kawasan pesisir dalam aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Sama dengan NGO lainnya, Bintari juga merupakan sebuah organisasi yang melakukan kerja sama atau kolaborasi, baik dengan pemerintah maupun NGO lainnya.

**Bentuk Intervensi Stakeholder terhadap Pengelolaan Kawasan Pesisir**

Setiap dinas ataupun organisasi maupun kelompok masyarakat yang terlibat tentunya memiliki penguasaan atau bidang urusan yang berbeda-beda, sehingga akan berbeda pula bentuk intervensi yang ada. Berikut adalah bentuk bantuan dari masing-masing *stakeholder*:

**Tabel 2**  
**Bentuk Intervensi Stakeholder**

Stakeholder	Bentuk Intervensi			
	Pembiayaan /Pendanaan	Pelatihan	Pemberdayaan	Bantuan Fisik
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pendanaan terkait bantuan fisik untuk wilayah pesisir. Saat ini sedang ada program pembuatan Eko Edu-wisata di kawasan pesisir Trimulyo. Sehingga hal tersebut tidak lepas dari pendanaan di dalamnya.	Terkait pembuatan Eko Edu-wisata, KKP bersama dengan dinas terkait mengadakan pelatihan dalam pengelolaan kawasan pariwisata tersebut nantinya yang akan menjadikan masyarakat sebagai peran utama.	Pelatihan yang sedang berlangsung tersebut dapat membuat mandiri dan membuat masyarakat mampu mengelola kawasan pariwisata.	Bantuan fisik sebagai penunjang ekoeduwisata adalah pembangunan alat pemecah ombak dalam bentuk <i>Hibryd Engineering (HE)</i> yang terbuat dari bambu.
Dinas Koperasi dan UMKM	Pada dasarnya dinas koperasi	Intervensi utama adalah pelatihan-	Tahap yang dilakukan belum	-

Stakeholder	Bentuk Intervensi			
	Pembiayaan /Pendanaan	Pelatihan	Pemberdayaan	Bantuan Fisik
	dan UMKM tidak memberikan bantuan secara materi. Akan tetapi terdapat bentuk kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan Perbankan dalam hal permodalan.	pelatihan dalam aspek pemasaran dan 'bagaimana cara pengelolaan usaha' terkait potensi pariwisata bercorak pesisir.	sampai pada tahap pemberdayaan.	
Dinas Pertanian	Terdapat alokasi dana ( <i>budgeting</i> ) akan tetapi dana tersebut tidak secara langsung diberikan untuk masyarakat ( <i>fresh money</i> ). Akan tetapi dalam bentuk program seperti penanaman mangrove.	Mengirim masyarakat untuk studi banding di Tuban Mangrove Center.	-	-
Dinas Pariwisata	Tidak ada alokasi khusus untuk pendanaan pada masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan advokasi pada Bappeda sebagai Badan yang mengurus masalah pariwisata dapat memberikan dana dengan jalur advokasi yang jelas dan sesuai.	Dinas pariwisata melaksanakan pelatihan desa wisata untuk masyarakat di kawasan pesisir.	Program pelatihan-pelatihan sudah pada tahap pemberdayaan, dimana masyarakat sudah mampu mandiri dan terbukti dengan terbentuknya Pokdarwis (kelompok sadar wisata) yang pada akhirnya mampu mengelola pariwisatanya sendiri seperti mmebentuk paket-paket wisata dan penjualan soevenir.	-
Badan Lingkungan Hidup	Bantuan dalam bentuk program.	-	-	Program penanaman mangrove bersama warga dan <i>stakeholder</i> lain.
FPIK Undip	-	Terdapat pelatihan terkait ekologi pesisir dan	-	-

Stakeholder	Bentuk Intervensi			
	Pembiayaan /Pendanaan	Pelatihan	Pemberdayaan	Bantuan Fisik
		penelitian guna pengembangan wilayah pesisir.		
LP2M Unnes	-	LP2M UNNES memfokuskan diri pada <i>livelihood</i> dan sosial masyarakat. Bagaimana ketahanan masyarakat pesisir terkait aktivitas sehari-hari.	-	-
DPWK Undip	-	Melatih masyarakat untuk bisa melakukan monitoring terhadap apa yang telah dilakukan.	-	-
Mercy Corps Indonesia	Pada hakikatnya tidak ada program pendanaan. Akan tetapi alokasi anggaran yang telah dibuat dialihkan pada program-program yang partisipatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan mata pencaharian berkelanjutan</li> <li>- pengembangan sistem informasi iklim</li> <li>- pengembangan ecotourism</li> <li>- pembuatan kerupuk ikan</li> <li>- pengembangan ikan berketahanan iklim</li> </ul>	Tahap yang dilakukan sudah pada tahap pemberdayaan.	Adanya program pembibitan dan penanaman mangrove dan pembangunan APO
Bintari	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan keterampilan masyarakat mengolah hasil laut dan pesisir</li> <li>- Edukasi masyarakat dan pemerintah pentingnya pesisir</li> </ul>	Tahap yang dilakukan sudah pada tahap pemberdayaan.	Pembibitan dan Penanaman mangrove dengan masyarakat

Sumber: Hasil Kuesioner, 2016

Pengelolaan pesisir di Trimulyo yang saat ini dilakukan salah satunya adalah pengembangan ekowisata mangrove. Melalui sumber dana dari KKP, dan diintegrasikan dengan kegiatan di daerah, maka pemerintah mengembangkan kawasan konservasi

sesuai dengan Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 di Kelurahan Trimulyo.

Dengan penetapan tersebut, pemerintah kota menjadikan kawasan

konservasi ini sebagai Ekoeduwisata Mangrove. Dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Pasal 13, bahwa tahapan dalam kegiatan ini meliputi (i) Perencanaan, (ii) Persiapan, (iii) Pelaksanaan dan (IV) Penyerahan Hasil. Adapun kegiatan Ekoeduwisata Mangrove ini telah masuk pada tahap persiapan. Pada tahap perencanaan telah dilakukan penyusunan Studi *Masterplan* Lahan Konservasi Mangrove di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2014, DED Lahan Konservasi dan Ekoeduwisata Mangrove di Kelurahan Trimulyo, Kec. Genuk Kota Semarang Tahun 2015.

Tahap persiapan dimulai dengan membentuk tim persiapan yang diusulkan ke Walikota Semarang dengan bukti SK Walikota No 130/209/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Konservasi Wilayah Pesisir

dan Ekoeduwisata Mangrove di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang dan koordinasi dengan masyarakat Trimulyo yang tercatat dalam sertifikat sebagai pemilik tambak dan Pemerintah Kelurahan Trimulyo. Pemerintah melalui Badan Pertahanan Nasional Kota Semarang juga telah melakukan pengukuran terhadap luas lahan untuk ekoeduwisata dan memberi patok sebagai batas-batasnya. Tahap selanjutnya adalah pengusulan SK Walikota tentang penetapan lokasi agar dapat menindaklanjuti pembebasan lahan dan SK Walikota tentang pelaksanaan pembangunan fisik Ekoeduwisata Mangrove.

Dalam menunjang ekoeduwisata ini, pemerintah telah membangun *hybrid engineering* (HE) yang berfungsi untuk melindungi tanaman mangrove dan menambah sedimentasi. Swasta dalam hal ini Mercycorp Indonesia juga membangun HE untuk menunjang kegiatan ekoeduwisata yang dilakukan oleh pemerintah.



Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2016

**Gambar 3**  
**Pembangunan *Hybrid Engineering* oleh: (a) KKP (b) Mercy Corp Indonesia**

Bantuan lain seperti pembibitan dan penanaman mangrove dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pada tahun ini KKP masih berencana untuk melakukan penanaman mangrove di Kelurahan Trimulyo, sedangkan NGO (Mercy Corp Indonesia melalui Bintari dan FPIK telah melakukan penanaman dan pembuatan saluran *Ecological Mangrove Restoration* (EMR). Metode ini dilakukan melalui perbaikan saluran

hidrologi dengan membuat cabang aliran air (kanal hidrologi) untuk meningkatkan pasokan nutrisi dan pembentukan sedimen pada lokasi tertentu sehingga mendukung pertumbuhan benih mangrove yang terbawa oleh arus, sehingga mangrove tumbuh secara alami di tempat-tempat tertentu yang mendukung keberlanjutan hidupnya. Metode ini dinilai sangat efisien. Rehabilitasi lahan

mangrove telah banyak dilakukan baik segi biaya dan waktu namun tidak menunjukkan perkembangan signifikan karena dilakukan dengan tidak

memahami autekologi dan ekologi mangrove yang diperlukan agar mangrove mampu tumbuh dan terus meregenerasi.



Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2016

**Gambar 4**  
**Pembangunan Saluran EMR oleh Mercy Corp Indonesia**



Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2016

**Gambar 5**  
**Penanaman Mangrove oleh Mercy Corp Indonesia**

### **Pola Intervensi Stakeholder dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Trimulyo**

Berdasarkan hasil identifikasi, dalam pengelolaan kawasan pesisir yang dilakukan oleh stakholder terdapat 4 pola hubungan yang terbentuk, yaitu (i) pemerintah non kolaborasi, (ii) pemerintah berkolaborasi dengan sesama Pemerintah (antar dinas), (iii) kolaborasi *multistakeholder* yaitu NGO,

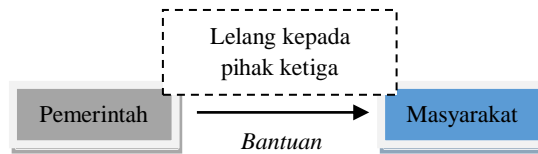
pemerintah dan akademisi dan (iv) swasta melalui program CSR. Dari keempat pola tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut masing-masing pola intervensi dalam pengelolaan kawasan pesisir:

a. Intervensi pemerintah non kolaborasi

Pada pola ini, pemerintah tidak berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya ataupun NGO.

Pemerintah langsung memberikan kepada masyarakat, namun jika bantuan dalam jumlah besar dan

dalam bentuk fisik bisa dilakukan dengan sistem lelang melalui orang ketiga.



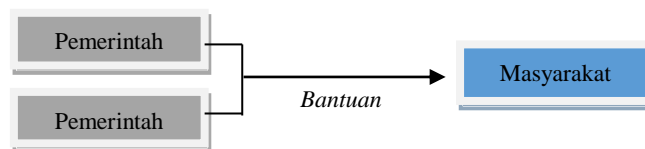
Sumber: Hasil Analisis, 2016

**Gambar 6**  
**Pola Intervensi Pemerintah Non Kolaborasi**

b. Kolaborasi antar pemerintah (antar dinas)

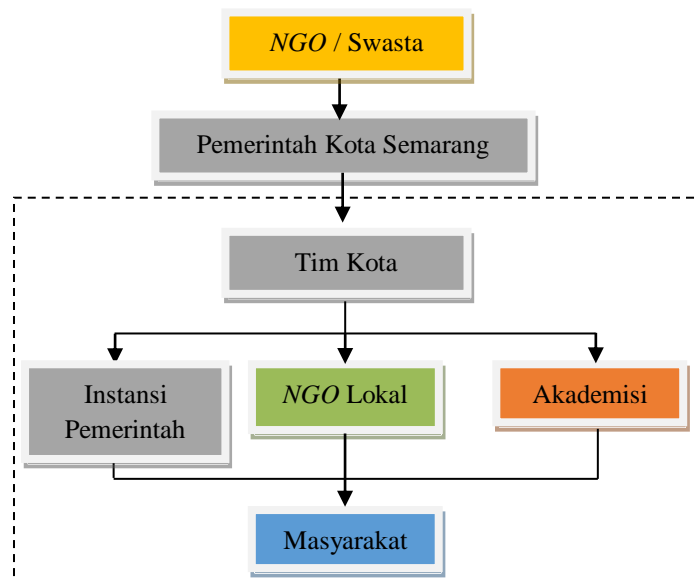
Pemerintah selain melakukan intervensi secara tunggal atau non kolaborasi juga melakukan intervensi dalam pengelolaan kawasan pesisir bersama pemerintah lainnya. Pemerintah disini adalah dinas-dinas

yang berada di setiap bidangnya, sehingga kolaborasi yang tercipta adalah kolaborasi antar dinas. Biasanya pola seperti ini lebih kepada pelatihan dan koordinasi.



Sumber: Hasil Analisis, 2016

**Gambar 7**  
**Pola Intervensi Kolaborasi Antar Pemerintah**



Sumber: Hasil Analisis, 2016

**Gambar 8**  
**Pola Intervensi Kolaborasi Multistakeholder**

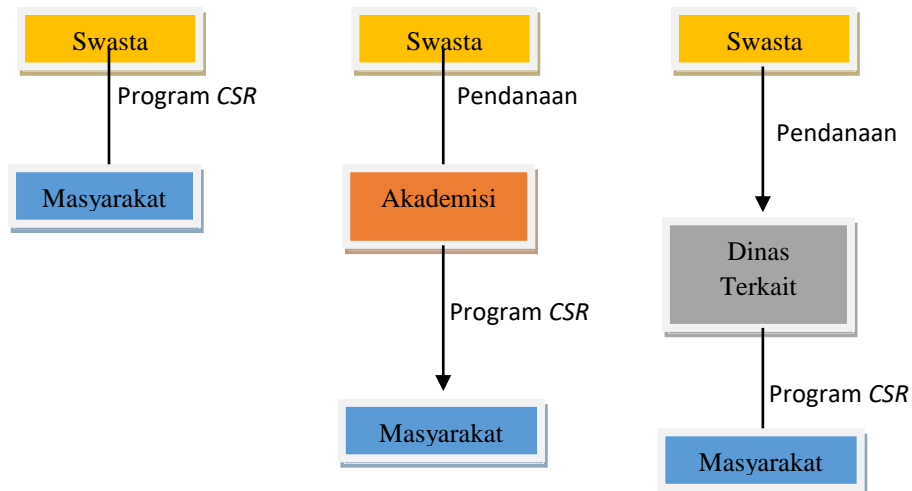
c. Kolaborasi *Multistakeholder*

Kolaborasi *multistakeholder* merupakan kolaborasi dari berbagai jenis *stakeholder*. *Stakeholder* tersebut adalah pemerintah, swasta NGO, dan Akademisi. Setiap *stakeholder* mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing dalam pelibatannya. Berikut pola hubungan pada kolaborasi *multistakeholder*:

kepedulian dari pihak swasta terhadap lingkungan sosial yang berada di sekitarnya. Bentuk dari program ini tentunya tidak hanya berupa ‘bantuan sosial’ tetapi juga bantuan fisik sebagai penunjang sosial aktivitas masyarakat. Dalam program CSR, terdapat 3 tipe pelaksanaannya. Ada yang langsung diberikan pada kelompok masyarakat, melalui dinas terlebih dahulu, dan melalui akademisi. Berikut penjabaran dari masing-masing pola:

d. Swasta

Pihak swasta memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR ini merupakan salah satu bentuk



Sumber: Hasil Analisis, 2016

**Gambar 9**  
**Pola Intervensi *Coorporate Social Responsibility (CSR)***

**Kelebihan dan Kekurangan dalam Pola Intervensi Stakeholder**

Dalam setiap jenis pola intervensi stakeholder tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan dan

kelebihan tersebut dapat menjadi rekomendasi kedepannya terkait mengatasi kekurangan dari setiap pola intervensi stakeholder yang ada. Berikut penjelasan dari kelebihan serta kekurangan tersebut:

**Tabel 3**  
**Kelebihan dan Kekurangan Pola Intervensi Stakeholder**

Jenis Intervensi	Kelebihan	Kekurangan	Solusi
Intervensi pemerintah non kolaborasi	Proses pembuatan konsep hingga eksekusi lebih cepat	Fokus bentuk bantuan hanya 1 linear (sesuai bidang dinas)	Pemberian bantuan harus <i>purposive</i> . Artinya mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas dari

Jenis Intervensi	Kelebihan	Kekurangan	Solusi
		Target atau sasaran bantuan menjadi lebih sempit	target yang diinginkan nantinya. Memfokuskan pengkajian bantuan lebih dalam mulai dari akar masalah hingga dampak paling besar agar semua masalah terselesaikan.
		Proses pengkajian masalah cenderung terbatas	Harus tetap ada pelibatan ahli atau seseorang yang menguasai bidang dari tujuan bantuan dalam pengkajian masalah. Walaupun eksekusinya bersifat mandiri.
		Monev dan evaluasi kurang dilakukan dengan kontinyu karena SDM terbatas	Meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada agar dapat bekerja multifungsi
Kolaborasi antar pemerintah (antar dinas)	Bentuk bantuan menjadi multi disiplin bidang	Penyamaan konsep dan ide menjadi lebih rumit	Mengkaji terlebih dahulu oleh para <i>stakeholder</i> secara bersama permasalahan yang ada serta apa saja yang dibutuhkan oleh target atau sasaran, sehingga saat penyamaan konsep sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan
	Peluang proses pendanaan ( <i>funding</i> ) menjadi lebih cepat dan luas terkait banyaknya keterlibatan dinas.	<i>Monev</i> kurang terarah, karena masing-masing dinas memiliki pola <i>monev</i> yang sendiri-sendiri	Harus ada konsep yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan <i>monev</i> serta indikator apa saja yang menjadi tujuan tercapainya pemberian bantuan tersebut. Serta harus ada satu bidang yang bertindak sebagai monitoring dan evaluasi yang anggotanya terdiri dari masing-masing <i>stakeholder</i> .
Kolaborasi <i>multistakeholder</i>	Bentuk bantuan menjadi multi kompleks	Membutuhkan waktu lebih banyak untuk melakukan koordinasi	Keberadaan teknologi harus mampu dimanfaatkan secara optimal seperti konsep <i>virtual meeting</i> melalui berbagai <i>platform</i> (contoh : <i>google hangout, skype</i> )
	Partisipasi warga menjadi meningkat karena banyaknya <i>stakeholder</i> yang terlibat dan peduli pada kondisi masyarakat	Proses pelaksanaan cenderung lebih lama	Harus terdapat badan/struktur pelaksanaan sebagai pengatur atau pengawas jalannya kegiatan guna ketepatan sasaran dan tujuan (waktu, target, <i>output</i> )
Swasta melalui program CSR	Peningkatan <i>awareness</i> pihak swasta terhadap sosial dan lingkungan	Belum sepenuhnya manfaat dan target CSR tercapai	Pada tahap perumusan tujuan dan proses sebelum eksekusi harus dilakukan

Jenis Intervensi	Kelebihan	Kekurangan	Solusi
	sekitar Menimbulkan rasa tanggung jawab bersama atas kondisi sosial dan lingkungan sekitar		pengkajian secara matang, dengan kata lain tidak terfokuskan pada pelaksanaan kegiatan.

Sumber: Hasil Analisis, 2016

### **Kesimpulan**

Pola intervensi setiap *stakeholder* tentunya menjadi suatu hal penting. Intervensi atau bentuk bantuan *stakeholder* merupakan bukti nyata dan merupakan 'eksekutor' dari segala rencana yang ada. Sehingga apabila terdapat kesalahan ataupun kelemahan dalam pelaksanaan maka akan mempengaruhi output dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam perumusan rencana sebelumnya. Tentunya tidak hanya pelaksanaannya saja yang menjadi indikasi keberhasilan, hal tersebut harus didukung dengan perencanaan-perencanaan sebelumnya. Rencana yang baik dan terarah tentunya akan menghasilkan output rencana yang terarah pula.

Pada dasarnya pola intervensi *stakeholder* yang ada dalam pengelolaan kawasan pesisir di Kota Semarang sudah berjalan begitu banyak dalam bentuk dan jenis aktivitasnya. Hal tersebut dapat direpresentasikan dalam program-program yang ada dan masih berlangsung hingga saat ini. Dalam pengelolaan kawasan pesisir yang dilakukan *stakeholder* terdapat 4 pola hubungan yang terbentuk, yaitu pemerintah secara mandiri atau non kolaborasi yaitu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, pemerintah berkolaborasi dengan sesama pemerintah (antar dinas), kolaborasi *multistakeholder* yaitu NGO, pemerintah dan akademisi dan yang terakhir adalah Swasta melalui program CSR (*corporate social responsibility*). Masing-masing pola memiliki kelebihan dan kekurangan. Kolaborasi pada dasarnya lebih ditekankan, karena

banyak orang yang bisa memberikan masukan dan mengontrol pelaksanaan intervensi tersebut.

Intervensi yang ada berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, yaitu penurunan degradasi lingkungan, penurunan ancaman bencana alam dan perubahan iklim di wilayah pesisir terkait rehabilitasi dan peremajaan kembali ekosistem lingkungan. Disamping itu, adanya berbagai pelatihan yang diberikan, menimbulkan rasa kemandirian dan resilience dalam aktivitas perekonomian masyarakat sekitar.

### **Saran**

Merubah pola intervensi yang ada tentunya bukan suatu cara yang tepat untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang ada. Saran yang dapat disimpulkan dari berbagai proses identifikasi adalah dengan cara memberikan solusi pada setiap kelemahan. Kelemahan-kelemahan dalam setiap intervensi seperti tidak purposivenya bantuan, masih adanya unsur politik serta tidak adanya kolaborasi antar *stakeholder* pada hakikatnya mampu diuraikan dengan berbagai *opportunity* yang ada dimana salah satunya adalah melalui sumber daya alam dan manusia serta percepatan perkembangan teknologi dan pembangunan yang ada. Sehingga dengan cara dan *opportunity* tersebut kelemahan-kelemahan tersebut yang merupakan ancaman dapat berkurang sehingga penghalang mencapai tujuan atau target yang diharapkan dapat berjalan secara lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, Annisa Nur. Kajian Kerentanan Iklim: Sebuah Penilaian Kembali di Wilayah Pesisir Kota Semarang. (2014). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 10 (3), September 2014: 316-329.
- Kusmana, Cecep. (2010). *Respon Mangrove terhadap Pencemaran*. Bogor: IPB.
- Saraswati, Adinda Arimbi. (2004). Konsep Pengelolaan Ekosistem Pesisir (Studi Kasus Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah). *Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT.5(3)*: 205-211.
- Suhelmi, Ifan R dan Hari Prihatno. (2014). Model Spasial Dinamik Genangan Akibat Kenaikan Muka Air Laut di Pesisir Semarang. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 21, No. 1, Maret 2014: 15-20.
- Susandi, Armi dkk. (2008). Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketinggian Muka Laut di Wilayah Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*. Volume 12 Nomor 12.
- Supohardjo. (2005). *Manajemen Kolaborasi Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Bogor: Pustaka Latin.
- Tadjudin Djuhendy. (2000). *Manajemen Kolaborasi*. Bogor: Pustaka Latin.
- Wibawa, Efi Ariyanta, dkk. (2012). *Studi Naiknya Muka Air Laut di Kawasan Pesisir Semarang*. Teknik Kelautan.

